

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Jl. :
.....
.....

Telepon :
Fax. :

Nomor :
Hal : Kelengkapan Permohonan Surat Keterangan Fiskal

Yth.
Nama :
NPWP :
Alamat :

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara Nomor tanggal tentang permohonan Surat Keterangan Fiskal, dengan ini diminta Saudara segera melengkapi data yang dapat kami terima paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya surat ini melalui faksimili dan atau sarana komunikasi lainnya. Data dimaksud yaitu

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Apabila kelengkapan data tersebut tidak dipenuhi, maka permohonan Surat Keterangan Fiskal Saudara tidak dapat diproses lebih lanjut.

Demikian untuk dimaklumi.

A.n. Kepala Kantor,
Kasi

.....
NIP.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Jl. :
.....
.....

Telepon :
Fax. :

SURAT KETERANGAN FISKAL

Nomor :
Tanggal :

Direktur Jenderal Pajak menerangkan bahwa kewajiban perpajakan dari perusahaan:

Nama
NPWP
Alamat

adalah sebagai berikut :

1. Tunggakan Pajak sampai saat ini :

PPH	PPN	PBB
Nihil	Nihil	Nihil

2. SPT Tahunan PPh *) :

3 (tiga) Tahun Pajak Terakhir	Penghasilan Kena Pajak
-----	Rp.
-----	Rp.
-----	Rp.

3. PPh Final *) :

3 (tiga) Tahun Pajak Terakhir	Objek	PPh Final (**)
-----	Rp.
-----	Rp.
-----	Rp.

4. PPB yang dibayar menurut Wajib Pajak :

Tahun Pajak	Jumlah SPPT/STTS PBB yang dibayar
-----	Rp.

Surat Keterangan ini diberikan untuk memenuhi permohonan Wajib Pajak dengan Surat Nomor tanggal

A.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

.....
NIP.

*) bagi wp non bursa cukup tahun terakhir.

***) merupakan jumlah pelunasan tahun yang bersangkutan baik melalui pemotongan maupun pembayaran sendiri.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Jl. :
.....
.....

Telepon :
Fax. :

SURAT PENOLAKAN PEMBERIAN
SURAT KETERANGAN FISKAL

Nomor :
Tanggal :

Direktur Jenderal Pajak menerangkan :

Nama :
NPWP :
Alamat :

Bahwa kepada Perusahaan tersebut tidak dapat diberikan Surat Keterangan Fiskal, karena :

- £ Tidak menyampaikan/memasukkan SPT Tahunan PPh 3 tahun terakhir *)
- £ Tidak menyampaikan/laporan Keuangan dan Neraca Rekonsiliasi yang telah di audit Akuntan Publik untuk 2 tahun terakhir (khusus bagi WP Bursa)
- £ Mempunyai tunggakan pajak atas ketetapan PPh/PPN/PBB tahun sebelumnya.
- £ Mempunyai tunggakan pajak tahun berjalan untuk jenis PPh Pasal 21/22/23/25/26 PPh Final/ PPN/ PPnBM/ PBB

A.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

.....
NIP.

*) Bagi WP Non Bursa cukup tahun terakhir.

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Nomor
Lampiran
Perihal Data Perpajakan atas nama
 PT.....
 NPWP

Yth. Kepala Kantor Wilayah
Jalan
.....

sehubungan dengan surat permohonan Surat Keterangan Fiskal dari Wajib Pajak tanggal,
Nomor Perihal tersebut diatas dengan ini disampaikan data perpajakan dimaksud sebagai berikut
:

1. SPT Tahunan PPh 3 (tiga) tahun terakhir *)

Tahun Pajak	Penghasilan Kena Pajak	Tanggal SPT diterima KPP

2. Pembayaran pajak dalam tahun berjalan (bulan..... s/d bulan.....)

No. Urut	Jenis Pajak (PPh Psl. 21/22/23/25/26 Final/PPN/PPnBM)	Jumlah Pajak yang Dibayar	Jumlah Pajak yang seharusnya Dibayar

*) Bagi WP Non Bursa cukup tahun terakhir.

1. Pembayaran Ketetapan Pajak

TAHUN PAJAK	JENIS PAJAK	JENIS KETETAPAN PAJAK	JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR	TANGGAL PEMBAYARAN LUNAS

2. Daftar Saham Pendiri

No.	Nama	NPWP	Jml Saham	Nilai Saham

3. Pembayaran PBB tahun terakhir menurut Wajib Pajak

Tahun Pajak.	Jumlah SPPT/STTS	Jumlah PBB yang harus Dibayar	Tanggal Pembayaran Lunas

Oleh karena Wajib Pajak telah/tidak memenuhi kewajibannya, maka permohonan untuk mendapatkan Surat Keterangan Fiskal dapat dikabulkan/agar ditolak.

Demikian untuk dimaklumi.

.....,20.....

Kepala Kantor,

.....
NIP.